



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

## 2023

**LAPORAN  
KINERJA SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, Kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja unit kerja Sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Padang, 20 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**FIRMAN**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	5
D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat.....	13
E. Sistematika Laporan.....	14
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16
C. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja .....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
C. Realisasi Anggaran.....	36
D. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	39
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	41
A. Kesimpulan.....	
B. Rekomendasi.....	42
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2023.....	8
Tabel 1.2	Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2023.....	11
Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Revisi.....	20
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	11
Tabel 3.2	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan.....	25
Tabel 3.3	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	27
Tabel 3.4	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.....	28
Tabel 3.5	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.....	29
Tabel 3.6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	30
Tabel 3.7	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal .....	31
Tabel 3.8	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.....	32
Tabel 3.9	Jumlah Keputusan yang ditetapkan TA 2023.....	32

Tabel 3.10	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat....	33
Tabel 3.11	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU.....	34
Tabel 3.12	Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	35
Tabel 3.13	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU.....	35
Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat.....	37

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	13
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2023.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.....	7
Gambar 2	KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi" .....	39
Gambar 3	JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang .....	40

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## 91,61%

Anggaran yang terealisasi pada Tahun 2023

Laporan Kinerja KPU Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat kepada *stakeholders* terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi

pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya Sekretariat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, pagu anggaran KPU sebesar Rp.20.689.313.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.20.504.476.287,- yakni 99,12%.

Tabel 1  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2023	Rp. 57.570.113.000,-	Rp. 52.742.275.943,-	91.61%
2	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%
3	2021	Rp. 18.498.611.000,-	Rp. 18.436.876.801,-	99.67%
4	2020	Rp. 109.308.812.000,-	Rp. 103.823.522.100,-	94.92%
5	2019	Rp. 34.639.855.000,-	Rp. 28.347.590.169,-	81.84%

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 adalah:

1. Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi" pada Rapat Koordinasi Nasional

Kehumasan dan PPID KPU Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 di Kota Tangerang, Banten.

2. Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang, penghargaan diberikan pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, di Jakarta pada tanggal 8 – 10 November 2023.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

### **1. Kedudukan**

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

### **2. Tugas**

Pasal 193 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, pada Pasal 194 Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan di Provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan;
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PPNPN adalah pegawai tidak tetap berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Pramusaji.

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan

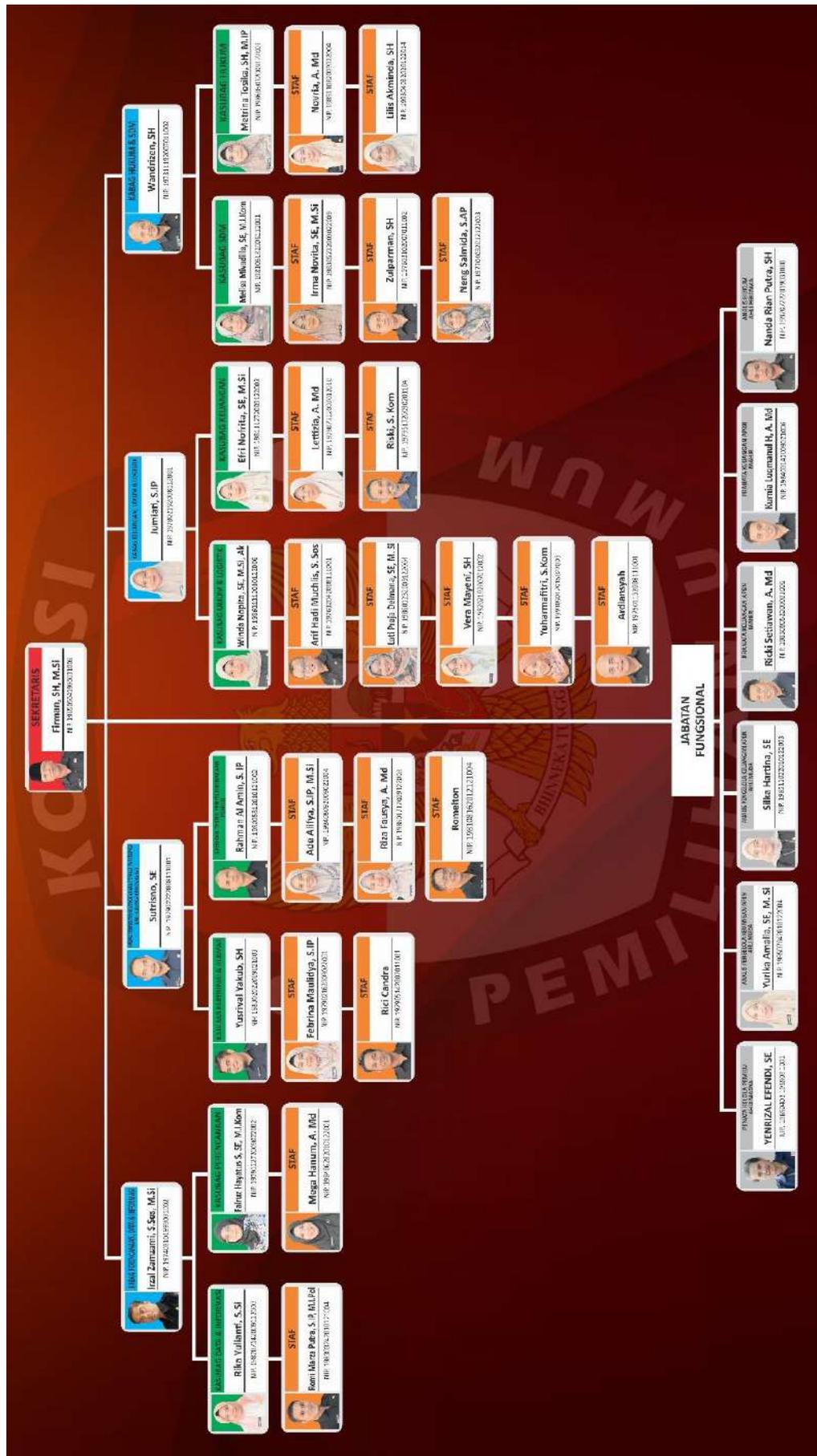
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti Analisis Tata Kelola Pemilu, Analisis Pengelola Keuangan dan Analisis Hukum.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PPNPN merupakan pegawai tidak tetap berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam atau *security*, Pramubakti dan Sopir.

Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**



Tabel 1.1  
Data Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2023

No	NAMA	NIP	JABATAN		JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM
			STRUKTURAL/FUNGSIONAL	4		
1	2	3	4	5	6	
1	Firman, SH, M.Si	196505041990031008	Sekretaris KPU Provinsi	L	S2 / Magister Administrasi Publik	
2	Yendrizal Effendi, SE	195804031988011003	Tata Kelola Pemilu Ahli Madya	L	S1 / Ekonomi	
3	Irzal Zamzami, S.Sos, M.Si	197403101993031002	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	L	S2 / Magister Administrasi Publik	
4	Wandrizen, SH	197311192007011002	Kabag Hukum dan SDM	L	S1 / Ilmu Hukum	
5	Jumiati, S.IP	197802192008112001	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	P	S1 / Ilmu Politik	
6	Sutrisno, SE	197902222008111001	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	P	S1 / Manajemen	
7	Fairuz Hayatus Syafari, SE, M.IKom	197912272009022002	Kasubbag Perencanaan	P	S2 / Magister Ilmu Komunikasi	
8	Winda Nopita, S.E., Akt, M.Si	198611112010122006	Kasubbag Umum dan Logistik	P	S2/ Akuntansi	
9	Melisa Mivadilla, SE, M.IKom	198105132008112001	Kasubbag SDM	P	S2 / Magister Ilmu Komunikasi	
10	Yusrival Yakub, SH	198302022009021003	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	L	SI / Ilmu Hukum	
11	Rika Yulianti, S.Si	198207142009122003	Kasubbag Data dan Informasi	P	SI / Statistika	
12	Metrina Tosika, SH	198605012009122001	Kasubbag Hukum	P	S2 / Tata Kelola Pemilu	
13	Rahman Al Amin, S.IP	198005312010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	L	SI / Ilmu Politik	

14	Efri Nofrita, SE, M. Si	198111272009122002	Kasubbag Keuangan	P	S2 / Tata Kelola Pemilu
15	Arif Hadi Muchlis, S.Sos	197612042008111001	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	L	SI / Ilmu Komunikasi
16	Febrina Maulidya, S.IP	197902162009022001	Penyuluh Pemilihan Umum	P	S1 / Ilmu Politik
17	Ade Alifya, S.IP, M.Si	198408092009022004	Analisis Pemilihan Umum	P	S2 / Tata Kelola Pemilu
18	Lati Praja Delmana, SE, M.Si	198601232009122004	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	P	S2 / Tata Kelola Pemilu
19	Yurika Amalia, SE, M.Si	198507042010122004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	P	S2/ Akuntansi
20	Romi Marza Putra, S.IP, M.IPol	198303242010121004	Analisis Data dan Informasi	L	S2/Tata Kelola Pemilu
21	Silka Hartina, SE	198511052010122003	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	P	SI / Akuntansi
22	Irma Novita, SE, M.Si	198305232009022009	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	P	S2/Tata Kelola Pemilu
23	Lettizia, A.Md	197907312007012010	Penyusun Laporan Keuangan	P	DIII / Pariwisata
24	Riski, S.Kom	197905172009021104	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	L	S1 Komputer
25	Ricki Setiawan, A.Md	198309052009021006	Pranata Keuangan APBN Mahir	L	D III Akuntansi
26	Kurnia Luqmanul Hakim, A.Md	198403142009021006	Pranata Keuangan APBN Mahir	L	D III Akuntansi
27	Novria, A.Md	198511082009022004	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	P	D III Akuntansi

28	Riza Fausya, A.Md	198601212009122003	Analisis Pemilihan Umum	P	DIII/Manajemen Informatika
29	Zulparman, SH	197603102007011002	Analisis Pengembangan Karier	L	S1 / Sarjana Hukum
30	Vera Mayeni, SH	198202102007012002	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	P	S1 / Sarjana Hukum
31	Mega Hanum, A.Md	198406282010122001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	P	DIII / Manajemen Informatika
32	Nanda Rian Putra, SH	*199207222019031003	Analisis Hukum Ahli Pertama	L	S1 / Sarjana Hukum
33	Yuharmafitri, S.Kom	199109012015022003	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	P	S 1/ Ilmu Komputer
34	Neng Salmida, S.AP	197704032012122003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	P	D III Teknik Konstruksi
35	Rahmat Hidayat, S.AP	199108062020121005	Analisis Pengelolaan Keuangan	L	S1 / Ilmu Sosial Politik
36	Lilis Akminda, SH	199304032020122014	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	P	S1 / Sarjana Hukum
37	Ardiansyah	197501132008111001	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	L	SMU
38	Rici Candra	197905142007011001	Pengelola Perpustakaan	L	SMP
39	Romelton	198108162012121004	Pengadministrasi Persuratan	L	Paket B

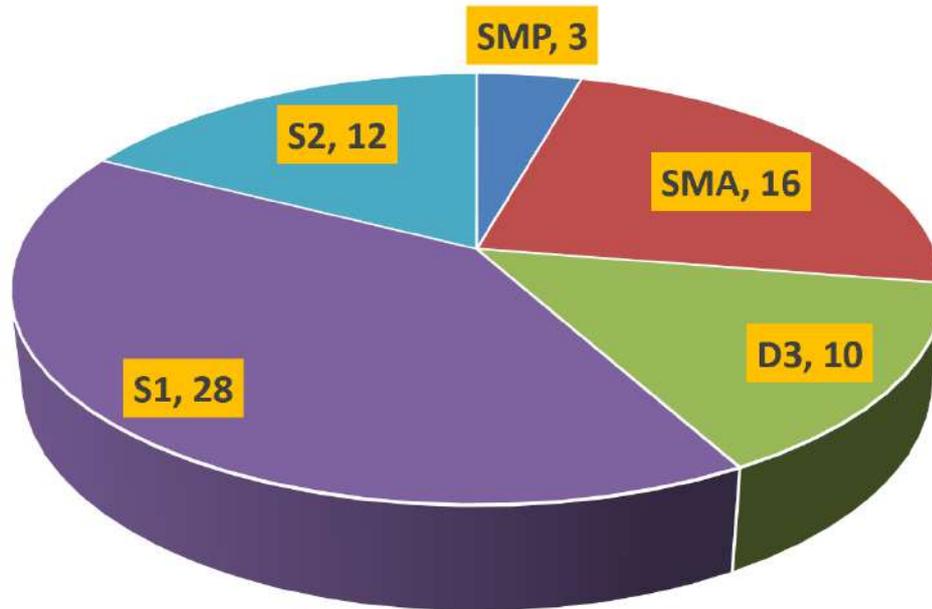
Tabel 1.2  
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Provinsi Sumatera  
Barat TA 2023

No	NAMA	JABATAN	JENIS		PENDIDIKAN UMUM
			KELAMIN		
1	2	4	5	6	
1	Budi Sutrisno, S.AP.	Tenaga Administrasi	L	S1	
2	Zulmaidi, S.Ds.	Tenaga Administrasi	L	S1	
3	Ibadurahman, S.T.	Tenaga Administrasi	L	S1	
4	Hendri Suhandi, S.Kom.	Tenaga Administrasi	L	S1	
5	M. Hariyanto Prima Saputra, S.H.	Tenaga Administrasi	L	S1	
6	Khoffah Idriani Suwardi, S.Kom.	Tenaga Administrasi	P	S1	
7	Kin Azura, S.Ds.	Tenaga Administrasi	L	S1	
8	Kurnia Fadhil Rael, S.Kom.	Tenaga Administrasi	L	S1	
9	Syafridho Syawal Ayuza, S.IP.	Tenaga Administrasi	L	S1	
10	Atika Rahmi, A.Md.	Tenaga Administrasi	P	D III	
11	Nurman Sjahputra	Pengemudi	L	D3	
12	Awalius Agus	Pengemudi	L	D3	
13	Dean Ladipo	Pengemudi	L	SMA	
14	Muhammad Iqbal, S.IP.	Pengemudi	L	S1	
15	M. Irfanishshadiq	Pengemudi	L	SMA	
16	Willi Septiawan, S.T.	Pengemudi	L	S1	
17	Yondra Oktavian	Pramubakti	L	SMA	
18	Oktarizal Wahyudi	Pramubakti	L	PAKET B	
19	Putri Lembayu	Pramubakti	P	SMA	
20	Rani Novita Sari	Pramubakti	P	SMA	
21	Irawadi	Pengamanan	L	SMA	

22	Dedet Riswandi	Pengamanan	L	STM
23	Daka Eka Putra	Pengamanan	L	SMK
24	Feliadi Herman Putra	Pengamanan	L	SMK
25	Robby Fernanda	Pengamanan	L	SMA
26	Prima Septi	Pengamanan	L	SMA
27	Sefra Diko Irwandi	Pengamanan	L	SMK
28	Tasmin Arif	Pengamanan	L	SMA
29	Suci Rahmadani	Pengamanan	P	SMA
30	Wahyu Ilhami	Pengamanan	L	STM

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1**  
**Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat**  
**KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



#### **D. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sedang menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Seleksi dan Pelantikan Komisioner KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota untuk masa bakti periode 2023 s.d 2028.
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

#### **Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Pengukuran Kinerja**

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

##### **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

##### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

#### **Penutup**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.

##### **2. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

##### **3. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 2020 sampai tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### 4. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 – 2024, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 melaksanakan 7 (tujuh) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya.
2. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.
4. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.
6. Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
7. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

#### B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	<p>Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :</p> <p>a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023</p> <p>b. Terbentuknya Badan Ad Hoc</p> <p>c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu</p> <p>d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu</p> <p>e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu</p> <p>f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu</p>	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
		h. Terlaksananya mitigasi resiko dan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Kompeten	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Mandiri, Profesional dan Berintegritas	<p>b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.</p> <p>c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.</p> <p>d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p>	100%
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	<p>Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :</p> <p>a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023</p> <p>b. Terbentuknya Badan Ad Hoc</p> <p>c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu</p> <p>d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu</p> <p>e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu</p> <p>f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
		h. Terlaksananya mitigasi resiko, Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

Pada tahun 2023 ini terjadi pergantian Komisioner masa bakti periode 2018-2023, tepatnya pada bulan Mei 2023, untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat membuat revisi terkait Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Revisi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi	85%

		Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	
2	Meingkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
6	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusunannya.	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah,	100%

	Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat	Tepat Jenis, Tepat Mutu dan tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Keempat sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 4 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU	85%		

	Kepemiluan dan Operasionalnya	Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan		80%	94,12%
2	Meingkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	90%	90%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	95%	95%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100%	100%	100%

		Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal			
6	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusunannya.	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	95%	95%
7	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tapat Mutu dan tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat	100%	80%	80%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	80,86%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	-	-

		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79%	90%	113,92 %
--	--	---	-----	-----	----------

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sasaran 1</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya</b>
------------------	---

Riset Kepemiluan dilaksanakan untuk menemukan akar permasalahan persoalan yang ditemukan dari setiap periode tahapan Pemilihan sampai akhir pelaksanaan Pemilihan. Riset Kepemiluan diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di masa yang akan datang.

Indikator kinerja untuk sasaran terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya. Cara perhitungan indikator kinerjanya yaitu membandingkan jumlah fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga riset kepemiluan, dengan jumlah fasilitasi Kerjasama yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	80%	94,12%

Pada tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan 3(tiga) fasilitas Kerjasama yaitu dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terkait riset kepemiluan, Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas terkait riset Kepemiluan, dan Pemerintah Daerah Kab. Agam terkait Pendidikan Pilih Berkelanjutan di Kab. Agam

## Sasaran 2 Meingkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti seleksi jabatan, diklat jabatan, diklat kepemiluan, S2 Tata Kelola Pemilu, dan alih status dari PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Organik KPU.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	90%	90%

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sudah tercapai sebesar 90%. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu:

1. S2 Tata Kelola Pemilu
2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelatihan Dasar (Latsar)
4. Ujian Dinas
5. Alih Status
6. Seleksi CPNS
7. Seleksi PPPK
8. Latsar Jagat Saksana

<b>Sasaran 3</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat</b>
------------------	---

Sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik negara (BMN).

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	90%	90%

**Sasaran 4**      **Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memutakhirkan atau memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/pemilihan berikutnya.

Sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan diukur dari indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	95%	95%

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah memutakhirkan data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu.

Sementara untuk Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 2.027.360, Pemilih Perempuan 2.061.246 total seluruhnya 4.088.606.

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat**  
**Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa/Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.640	189.263	191.359	380.622
2	SOLOK	14	74	1.360	142.514	144.637	287.151
3	SIJUNJUNG	8	62	762	86.420	86.462	172.882
4	TANAH DATAR	14	75	1.228	137.985	142.047	280.032
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.365	161.681	164.622	326.303
6	AGAM	16	92	1.721	193.255	194.745	388.000
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.261	143.841	148.264	292.105
8	PASAMAN	12	62	941	108.561	110.007	218.568
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	367	34.262	31.867	66.129
10	DHARMASRAYA	11	52	693	84.064	82.923	166.987
11	SOLOK SELATAN	7	39	599	65.179	64.249	129.428
12	PASAMAN BARAT	11	90	1.286	147.599	148.655	296.254
13	KOTA PADANG	11	104	2.681	325.912	340.266	666.178
14	KOTA SOLOK	2	13	236	27.524	28.308	55.832
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	208	24.865	24.574	49.439
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	196	21.424	22.058	43.482
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	46.726	48.342	95.068
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	371	50.418	52.050	102.468
19	KOTA PARIAMAN	4	71	289	35.867	35.811	71.678
<b>TOTAL</b>		<b>179</b>	<b>1.265</b>	<b>17.569</b>	<b>2.027.360</b>	<b>2.061.246</b>	<b>4.088.606</b>

KPU Kabupaten/Kota kesulitan mendapatkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan *stakeholder* lainnya.

- a. Minimnya anggaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- b. Aplikasi Sidalih belum mengakomodir pengkodean pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS) sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
- c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

<b>Sasaran 5</b>	<b>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal di Provinsi Sumatera Barat</b>
------------------	--

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

<b>Sasaran 6</b>	<b>Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusunannya.</b>
------------------	--

Penetapan Peraturan KPU maupun Keputusan KPU dilakukan oleh KPU RI, sedangkan untuk Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	95%	95%

Terkait dengan rancangan surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU, untuk Keputusan yang dihasilkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Keputusan yang ditetapkan TA 2023**

NO	KEPUTUSAN	JUMLAH
1	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	51
2	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	94

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dan juga produk hukum lainnya juga dapat di akses oleh publik di laman <https://jdih.kpu.go.id/sumbar>, dan sebagai media informasi dan edukasi yang berkaitan dengan produk hukum melalui Instagram **jdihkpu\_sumbar**.

<b>Sasaran 7</b>	<b>Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat</b>
------------------	--

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase Satuan Kerja (Satker) yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat	100%	80%	80%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

<b>Sasaran 8</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat</b>
------------------	--

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Nilai Akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2023.

**Tabel 3.11**  
**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	80,86%

Berdasarkan surat dinas Inspektorat KPU RI Nomor 3167/PW.02-SD/12/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mendapat nilai 80,86% (BB).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 63,28 (B).

#### **1. Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Terkait dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai target WTP sesuai dengan yang telah di dapat pada tahun 2023.

**Tabel 3.12**  
**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-

## 2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

**Tabel 3.13**

### **Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79%	90%	113,92%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU telah memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen dalam organisasi baik Anggota KPU maupun Pegawai. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibutuhkan komitmen, baik yang terlibat langsung pada tim Reformasi Birokrasi maupun secara tidak langsung. Seluruh pegawai mesti berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan terus berupaya melakukan perubahan mental ke arah yang lebih baik dan selalu meningkatkan kapasitas kemampuan diri.

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 secara umum telah berjalan cukup baik. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penancangan Pembangunan Zona Integritas pada 12 Desember 2022 lalu. Pembangunan Zona Integritas menunjukkan kesungguhan institusi dalam mengukuhkan komitmen untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disertai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. KPU Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai implementasi pelayanan publik yang prima dan berintegritas dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Barat.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61% dari pagu anggaran tahun 2023. Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi

Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART).

Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat**

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
<b>CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>		<b>Rp 45.978.084.000</b>	<b>Rp 41.235.556.754</b>	<b>89,69%</b>	<b>Rp 4.742.527.246</b>
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp 102.813.000	Rp 92.267.960	89,74%	Rp 10.545.040
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp 18.108.000	Rp 16.849.800	93,05%	Rp 1.258.200
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp 105.000.000	Rp 95.829.900	91,27%	Rp 9.170.100
6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp 30.796.000	Rp 25.120.360	81,57%	Rp 5.675.640
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 26.499.558.000	Rp 25.018.993.248	94,41%	Rp 1.480.564.752
6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp 78.251.000	Rp 77.599.868	99,17%	Rp 651.132
6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp 690.977.000	Rp 547.365.043	79,22%	Rp 143.611.957
6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp 309.352.000	Rp 298.296.162	96,43%	Rp 11.055.838
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp 15.840.669.000	Rp 12.815.502.765	80,90%	Rp 3.025.166.235
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 77.733.000	Rp 75.736.090	97,43%	Rp 1.996.910
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp 627.650.000	Rp 615.466.438	98,06%	Rp 12.183.562
6888	Penetapan Peserta Pemilu	Rp 22.542.000	Rp -	0,00%	Rp 22.542.000
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp 234.694.000	Rp 232.400.391	99,02%	Rp 2.293.609
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 1.339.941.000	Rp 1.324.128.729	98,82%	Rp 15.812.271
<b>CQ Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp 11.592.029.000</b>	<b>Rp 11.506.719.189</b>	<b>99,26%</b>	<b>Rp 85.309.811</b>
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 6.194.405.000	Rp 6.129.933.543	98,96%	Rp 64.471.457
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp 10.000.000	Rp 9.330.750	93,31%	Rp 669.250
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp 35.140.000	Rp 31.822.220	90,56%	Rp 3.317.780
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 5.310.600.000	Rp 5.294.282.676	99,69%	Rp 16.317.324
6634	Data dan Informasi	Rp 41.884.000	Rp 41.350.000	98,73%	Rp 534.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 57.570.113.000</b>	<b>Rp 52.742.275.943</b>	<b>91,61%</b>	<b>Rp 4.827.837.057</b>

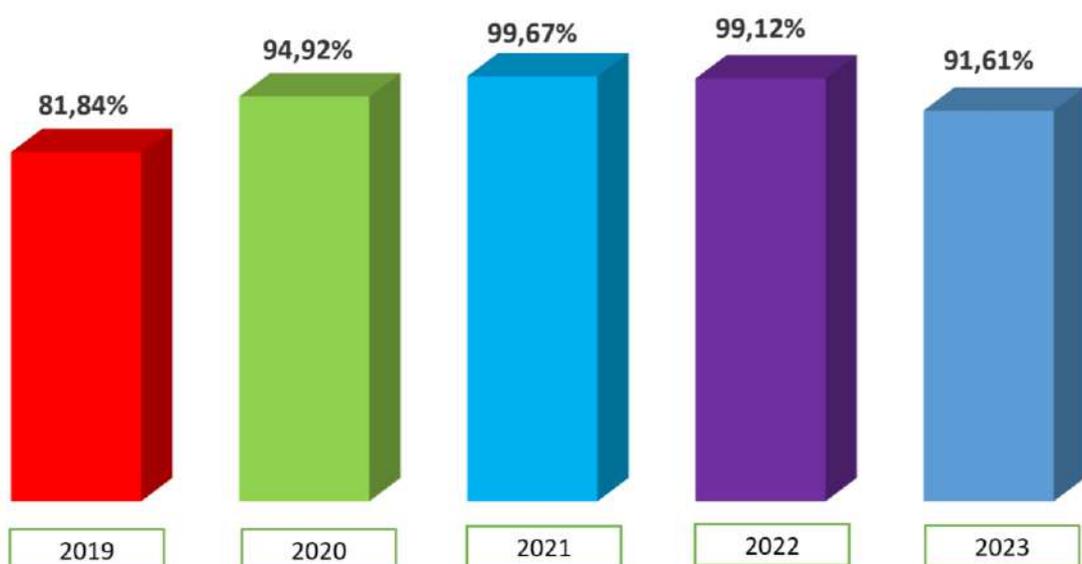
Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menurun dari tahun 2022, di mana realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99.12%.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 95% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)
3. Pembayaran termin I Pengadaan barang dan jasa logistik Tahap II kontrak tahun jamak tidak bisa direalisasikan, karena tidak selesainya proses termin I tahun 2023.
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

**Grafik 3**  
**Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019 s/d 2023**



#### D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi" pada Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID KPU Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 di Kota Tangerang, Banten.



**Gambar 2**

KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi"

Selanjutnya, JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang. Penghargaan diberikan pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, di Jakarta pada tanggal 8 – 10 November 2023.



**Gambar 3**

JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 91.01 %.

Selama TA 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu 2024 yang ada pada tahun 2023 antara lain telah melaksanakan Seleksi dan Pelantikan Komisioner KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota untuk masa bakti 2023 s.d 2028; telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024; telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribuan Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 91.61% dari total pagu anggaran sebesar Rp

57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu).

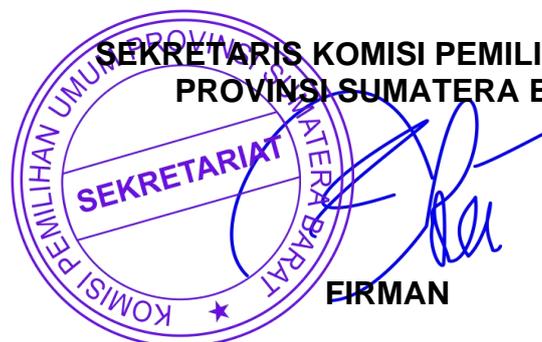
## **B. Rekomendasi**

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**FIRMAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUK SRI MULYANI  
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 9 Januari 2023

KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI

## PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
		a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%	
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11.300.859.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 10.147.809.000,-

Padang, 9 Januari 2023

KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Efitrimen

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**SURYA EFITRIMEN**

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.104.724.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 10.633.226.000,-

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



**SURYA EFITRIMEN**

## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Provinsi Sumatera Barat	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Surya Efitrimen

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 27 Juni 2023

**PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SURYA EFRITIMEN**

**PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**FIRMAN**

**Program**

**Anggaran**

- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 28.104.724.000,- |
| 2. Dukungan Manajemen  | Rp. | 10.633.226.000,- |

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA KPU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**SURYA EFITRIMEN**

**SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**



**FIRMAN**

## PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasiltasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Memuatahkirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
6	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusunannya	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat	100%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.  
Telp: (0751) 446654, Email: [prov\\_sumbar@kpu.go.id](mailto:prov_sumbar@kpu.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman  
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yanuk Sri Mulyani  
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

YANUK SRI MULYANI

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN

## PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terasiliasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	
		d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
h. Terlaksananya mitigasi resiko dan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu			
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	11.300.859.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.	10.147.809.000,-

Padang, 9 Januari 2023

KETUA KPU  
PROVINSI SUMATERA BARAT



YANUK SRI MÜLYANI

SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

### RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Padang, 5 Desember 2022

KETUA  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI



## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	
		d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
		h. Terlaksananya mitigasi resiko dan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

Padang, 5 Desember 2022

SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:40 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,832,504,209	5,827,619,737	4,884,472	0.084
Beban Persediaan	152,165,210	146,511,161	5,654,049	3.859
Beban Barang dan Jasa	25,830,232,805	9,288,497,856	16,541,734,949	178.088
Beban Pemeliharaan	504,269,128	228,147,415	276,121,713	121.028
Beban Perjalanan Dinas	9,994,439,587	4,655,651,818	5,338,787,769	114.673
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT  
 SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:40 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	232,515,021	449,384,415	(216,869,394)	(48.259)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(42,238)	(372,119)	329,881	(88.649)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	42,546,083,722	20,595,440,283	21,950,643,439	106.58
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,546,083,722)	(20,595,440,283)	(21,950,643,439)	106.58
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	83,533,444	(83,533,444)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	87,460,050	(87,460,050)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,926,606	(3,926,606)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	650,411,377	102,561,000	547,850,377	534.17
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	101,264,575,213	102,561,000	101,162,014,213	98.635.948
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,614,163,836	0	100,614,163,836	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	650,411,377	186,094,444	464,316,933	249.506
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	105.277
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	105.277

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN  
196505041990031008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT  
 SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM  
 Tgl Cetak : 18/01/24 10:41 AM  
 Halaman : 1  
 lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,028,573,829	4,175,564,947	(146,991,118)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(243,851)	243,851	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	(243,851)	243,851	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	95,822,341,251	20,262,598,572	75,559,742,679	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	53,926,668,906	(146,991,118)	54,073,660,024	-
EKUITAS AKHIR	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	-

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN  
 196505041990031008



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076  
**ESELON I** : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01  
**SATUAN KERJA** : KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 654301

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM  
Tgl Cetak : 18/01/24 10:42 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>57,570,113,000</b>	<b>52,650,633,258</b>	<b>(4,919,479,742)</b>	<b>91</b>	<b>20,689,313,000</b>	<b>20,478,273,372</b>	<b>(211,039,628)</b>	<b>99</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN  
196505041990031008

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,317,752,389	0	50,317,752,389	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>50,317,752,389</b>	<b>0</b>	<b>50,317,752,389</b>	
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,111,363,000	2,426,907,000	684,456,000	28.20
Peralatan dan Mesin	6,593,884,390	3,745,815,390	2,848,069,000	76.03
Gedung dan Bangunan	988,149,650	892,347,000	95,802,650	10.74
Aset Tetap Lainnya	72,475,800	0	72,475,800	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,132,396,592)	(2,899,881,571)	(232,515,021)	8.02
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7,633,476,248</b>	<b>4,165,187,819</b>	<b>3,468,288,429</b>	<b>83.27</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,221,000	23,116,250	(18,895,250)	(81.74)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(73,344)	(115,582)	42,238	(36.54)
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>4,147,656</b>	<b>23,000,668</b>	<b>(18,853,012)</b>	<b>(81.97)</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>4,147,656</b>	<b>23,000,668</b>	<b>(18,853,012)</b>	<b>(81.97)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	298,932,130	583,932,130	(285,000,000)	(48.81)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(298,932,130)	(583,932,130)	285,000,000	(48.81)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>57,955,376,293</b>	<b>4,188,188,487</b>	<b>53,767,187,806</b>	<b>1,283.78</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	133,558	159,614,658	(159,481,100)	(99.92)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>133,558</b>	<b>159,614,658</b>	<b>(159,481,100)</b>	<b>(99.92)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>133,558</b>	<b>159,614,658</b>	<b>(159,481,100)</b>	<b>(99.92)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	1,338.60
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>57,955,242,735</b>	<b>4,028,573,829</b>	<b>53,926,668,906</b>	<b>1,338.60</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>57,955,242,735</b>	<b>4,028,573,829</b>	<b>53,926,668,906</b>	<b>1,338.60</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>57,955,376,293</b>	<b>4,188,188,487</b>	<b>53,767,187,806</b>	<b>1,283.78</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN  
196505041990031008

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	50,317,752,389	0
0.0	131111	Tanah	3,111,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,593,884,390	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	988,149,650	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	72,475,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,027,565,771
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	104,830,821
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	4,221,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	73,344
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	298,932,130	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	298,932,130
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	133,558
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	52,650,633,258
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,475,250	0
0.0	313211	Transfer Keluar	7,806,025,146	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,028,573,829
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	51,002,208,389
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,580,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	644,831,845
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	100,614,163,368
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,828,621,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	26,350	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122,290,210	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	44,699,020	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	186,620,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	39,700,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,979,459	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	110,875,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	213,114,700	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	51,145,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,302,773,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,921,660,350	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,196,118,962	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,504,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	162,516,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	107,883,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,698,129,909	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	638,125,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,728,347,800	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	34,721,750	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	122,086,489	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	592,186	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,036,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,097,225,316	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	79,860,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,954,085,593	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	322,071,703	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182,197,425	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	4,419,879,962	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	352,210,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,207,740,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,014,609,625	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222,559,877	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,955,144	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	152,165,210	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	100,614,163,836	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	42,238
<b>JUMLAH</b>			<b>212,377,568,551</b>	<b>212,377,568,551</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN

196505041990031008

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:44 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	52,650,633,258
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,475,250	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	18,895,250
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,580,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,828,621,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,809	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122,290,210	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,699,020	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	186,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,700,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,979,459	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,875,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	213,888,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51,145,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,302,773,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,080,492,950	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,913,764,676	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,636,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	162,516,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	107,883,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,705,963,809	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	638,125,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,770,092,800	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	34,721,750	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,197,854,179	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	132,573,293	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	740,744	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,333,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,097,225,316	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	79,860,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,957,614,006	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370,088,703	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,206,425	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,154,711,152	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,860,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,254,220,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,470,301,672	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,963,573,800	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 654301 ) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:44 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,300,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	7,978,450	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	68,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	459
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	773,300
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	41,745,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	500,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	9,800,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	21,763,426
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	45,600,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,995,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,445,500
JUMLAH			52,808,731,193	52,808,731,193

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

\*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARANFIRMAN  
196505041990031008